

Nama : Arnesta Az Zahra
NPM : 2313031066
Kelas : C
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik

1. Karakteristik sektor publik meliputi orientasi non-profit yang bertentangan dengan profitabilitas sektor swasta. Analisislah skenario di mana sebuah pemerintah daerah harus memilih antara proyek infrastruktur dengan pengembalian finansial rendah namun manfaat sosial tinggi, atau proyek komersial dengan profit tinggi namun risiko sosial. Mana yang lebih sesuai dengan karakteristik publik berdasarkan prinsip akuntabilitas dan *equity*, dan jelaskan alasan Anda dengan mempertimbangkan *trade-off* antara keuntungan ekonomi dan kepentingan masyarakat.
 - a) Proyek infrastruktur, karena fokus pada manfaat sosial jangka panjang.
 - b) Proyek komersial, karena mendukung efisiensi ekonomi.
 - c) Kedua proyek sama valid, tergantung pada anggaran tersedia.
 - d) Tidak ada yang sesuai, karena sektor publik harus menghindari risiko.
 - e) Proyek infrastruktur dengan modifikasi untuk profit tambahan.
2. Lingkungan sektor publik ditandai oleh regulasi ketat seperti Undang-Undang Keuangan Negara yang menekankan transparansi. Evaluasi situasi di mana regulasi ini gagal mencegah korupsi karena implementasi yang lemah, dan apa implikasi utama terhadap kepercayaan publik serta *governance*. Bagaimana hal ini dapat diperbaiki untuk meningkatkan akuntabilitas?
 - a) Tidak ada implikasi signifikan, karena regulasi dapat diperbaiki internal.
 - b) Mengurangi kepercayaan publik, sehingga perlu audit independen dan pelatihan.
 - c) Meningkatkan regulasi tanpa evaluasi, untuk menghindari risiko.
 - d) Fokus hanya pada sanksi hukum tanpa perbaikan sistemik.
 - e) Mengintegrasikan regulasi dengan insentif positif untuk mendorong kepatuhan.
3. sektor publik seperti fokus pada pelayanan publik mensintesis dengan lingkungan politik yang penuh tekanan. Sintesislah bagaimana kombinasi ini mempengaruhi pengambilan keputusan anggaran untuk proyek pendidikan versus stimulus ekonomi, dan mana strategi yang paling optimal untuk keseimbangan antara kebutuhan sosial

dan stabilitas politik.

a) Prioritas proyek pendidikan, karena mendukung pelayanan publik.

b) Prioritas stimulus ekonomi, karena merespons tekanan politik.

c) Kombinasi keduanya dengan prioritas pada akuntabilitas jangka panjang.

d) Tidak ada strategi optimal, karena tekanan politik selalu dominan.

e) Gabungkan dengan konsultasi stakeholder untuk inklusivitas.

4. Bandingkan karakteristik entitas pemerintah (seperti akuntabilitas publik) dengan entitas swasta (seperti orientasi profit). Evaluasi tantangan utama yang dihadapi akuntan sektor publik dalam menyusun laporan keuangan yang akurat di lingkungan regulasi ketat, dan bagaimana tantangan ini berbeda dari fokus profit di swasta.

a) Tantangan sama, karena keduanya mematuhi standar akuntansi.

b) Tantangan adalah intervensi politik yang mengurangi objektivitas, berbeda dari profit di swasta.

c) Tidak ada perbedaan signifikan, karena lingkungan serupa.

d) Tantangan hanya teknis, seperti kompleksitas data.

e) Tantangan lebih besar di swasta karena risiko pasar.

5. transparansi dalam sektor publik memerlukan pengungkapan informasi keuangan. Jika sebuah badan pemerintah menerapkan sistem transparansi digital untuk mencegah korupsi, evaluasi potensi manfaat dan risiko terhadap lingkungan publik yang penuh pengawasan. Apa langkah yang harus diambil untuk memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan risiko?

a) Hindari implementasi, karena risiko keamanan data tinggi.

b) Terapkan tanpa modifikasi, karena manfaat transparansi otomatis.

c) Evaluasi risiko seperti misinformasi, dan tambahkan mekanisme verifikasi independen.

d) Fokus hanya pada manfaat jangka pendek tanpa evaluasi.

e) Integrasikan dengan pelatihan staf dan audit berkala untuk akuntabilitas.

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

6. Pemerintah Kota X sedang menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai program sosial dan infrastruktur. Manajer keuangan daerah dihadapkan pada pilihan antara meningkatkan pajak daerah atau melakukan efisiensi belanja publik.

Dalam konteks akuntansi manajemen sektor publik, langkah apa yang paling tepat untuk diambil terlebih dahulu?

- a. Meningkatkan pajak agar pendapatan daerah bertambah
- b. Mengurangi seluruh kegiatan yang tidak menghasilkan PAD
- c. Melakukan analisis biaya-manfaat terhadap setiap program kerja
- d. Menghapus program sosial agar anggaran infrastruktur cukup
- e. Mengajukan pinjaman daerah untuk menutup kekurangan anggaran

7. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengukur hasil (*outcome*) dari program pemerintah. Apa strategi manajerial yang paling tepat untuk mengatasi tantangan tersebut?

- a. Mengganti pengukuran outcome dengan input agar lebih mudah dihitung
- b. Menggunakan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan program
- c. Menyusun laporan keuangan berbasis akrual secara penuh
- d. Meningkatkan realisasi anggaran agar serapan terlihat maksimal
- e. Mengalokasikan dana tambahan untuk program yang populer di masyarakat

8. Suatu lembaga pemerintah memiliki rasio efisiensi yang tinggi, namun masyarakat masih merasa tidak puas terhadap layanan yang diberikan. Berdasarkan konsep akuntansi manajemen sektor publik, apa yang perlu dievaluasi oleh lembaga tersebut?

- a. Efektivitas program dan kualitas pelayanan publik
- b. Rasio keuangan yang menunjukkan profitabilitas lembaga
- c. Penghematan biaya administrasi dan operasional
- d. Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelayanan publik
- e. Sumber dana hibah yang diterima dari pemerintah pusat

9. Dalam penganggaran sektor publik, prinsip *value for money* mengharuskan setiap rupiah anggaran dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif. Jika suatu program pemerintah mampu menekan biaya 20% tanpa menurunkan kualitas layanan, prinsip apa yang paling dominan diterapkan?

- a. Ekonomi
- b. Efisiensi
- c. Efektivitas

- d. Akuntabilitas
- e. Transparansi

10. Sebuah instansi pemerintah ingin meningkatkan akuntabilitas publik melalui sistem pelaporan kinerja yang lebih transparan. Manajer keuangan ingin menambahkan analisis varians (*variance analysis*) dalam laporan bulanan. Tujuan utama dari analisis tersebut adalah...

- a. Membandingkan hasil aktual dengan target anggaran untuk mengetahui penyimpangan
- b. Menentukan jumlah dana yang akan diterima dari pusat
- c. Menilai kinerja individu berdasarkan tingkat kehadiran
- d. Meningkatkan pendapatan melalui inovasi pajak daerah
- e. Menghapus kegiatan yang tidak menghasilkan surplus

Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

11. Dalam suatu instansi pemerintah daerah, ditemukan bahwa beberapa kegiatan berjalan tanpa prosedur monitoring yang jelas. Akibatnya, realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Sebagai manajer publik, tindakan apa yang paling tepat untuk memperkuat sistem pengendalian manajemen?

- a. Menambah jumlah laporan keuangan setiap triwulan
- b. Menetapkan indikator kinerja utama dan mekanisme evaluasi rutin
- c. Mengurangi jumlah kegiatan agar lebih mudah diawasi
- d. Mengalihkan tanggung jawab pengawasan kepada pihak ketiga
- e. Meningkatkan jumlah pegawai pada bagian keuangan

12. Sebuah lembaga publik memiliki laporan keuangan yang akurat, tetapi tetap mengalami kebocoran anggaran karena manipulasi dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan konsep Sistem Pengendalian Manajemen (SPM), komponen apa yang paling mungkin lemah dalam kasus ini?

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Informasi dan komunikasi
- c. Aktivitas pengendalian

- d. Pemantauan (monitoring)
- e. Penilaian risiko

13. Kementerian X ingin menerapkan sistem pengendalian manajemen berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, beberapa pegawai menolak perubahan karena kurangnya pemahaman teknologi. Sebagai pimpinan, apa langkah strategis yang mencerminkan penerapan sistem pengendalian manajemen yang adaptif?

- a. Memaksa seluruh pegawai menggunakan sistem tanpa pelatihan
- b. Mengadakan pelatihan internal dan uji coba sistem sebelum diterapkan penuh
- c. Menunda implementasi hingga seluruh pegawai setuju
- d. Menghapus sistem digital karena tidak sesuai budaya organisasi
- e. Menyerahkan proyek kepada pihak swasta tanpa supervisi

14. Dalam audit internal lembaga pemerintah, ditemukan bahwa laporan kinerja unit kerja selalu menunjukkan hasil maksimal, namun data lapangan tidak mendukung klaim tersebut. Dari perspektif sistem pengendalian manajemen, apa penyebab utama yang paling mungkin terjadi?

- a. Kelemahan pada sistem pelaporan keuangan berbasis kas
- b. Ketidaksesuaian indikator kinerja dengan tujuan organisasi
- c. Kurangnya keterampilan teknis auditor internal
- d. Pengawasan eksternal terlalu sering dilakukan
- e. Perubahan anggaran dilakukan tanpa revisi dokumen resmi

15. Pemerintah pusat menerapkan sistem *performance-based budgeting* untuk memastikan anggaran digunakan sesuai hasil yang ingin dicapai. Namun, beberapa dinas masih berfokus pada penyerapan anggaran, bukan pencapaian kinerja. Dari sisi sistem pengendalian manajemen, apa reformasi yang perlu dilakukan?

- a. Menghapus mekanisme pelaporan kinerja agar proses lebih cepat
- b. Mengaitkan insentif pegawai dengan pencapaian indikator kinerja utama
- c. Meningkatkan target belanja modal setiap tahun
- d. Mengurangi jumlah unit kerja yang menerima anggaran besar
- e. Menyusun laporan manual untuk memudahkan audit

Penganggaran Sektor Publik

16. Pemerintah Kabupaten A mengalami rendahnya serapan anggaran pada triwulan pertama, sementara target kinerja fisik justru sudah hampir tercapai. Berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, apa yang perlu dievaluasi terlebih dahulu?
- a. Proses penetapan pagu indikatif yang terlalu kecil
 - b. Kesesuaian antara alokasi anggaran dan indikator kinerja program
 - c. Kualitas sumber daya manusia bagian keuangan daerah
 - d. Frekuensi pelaporan realisasi anggaran ke pusat
 - e. Kecepatan proses pencairan dana oleh bendahara umum daerah
17. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), setiap unit kerja diwajibkan mengaitkan setiap kegiatan dengan sasaran strategis organisasi. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah...
- a. Menjamin anggaran terserap penuh setiap tahun
 - b. Meningkatkan transparansi kepada legislatif daerah
 - c. Menyinkronkan antara perencanaan dan penganggaran agar efektif dan terarah
 - d. Menekan biaya administrasi penyusunan anggaran
 - e. Mempercepat proses penetapan APBD
18. Sebuah dinas pendidikan menetapkan anggaran pelatihan guru sebesar Rp1 miliar. Namun, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kompetensi guru tidak signifikan. Berdasarkan konsep *value for money*, aspek apa yang paling perlu ditinjau kembali?
- a. Ekonomi, karena biaya pelatihan terlalu besar
 - b. Efisiensi, karena output tidak sebanding dengan biaya
 - c. Efektivitas, karena hasil program tidak sesuai tujuan yang ditetapkan
 - d. Akuntabilitas, karena laporan tidak disampaikan tepat waktu
 - e. Transparansi, karena penggunaan dana tidak diumumkan publik
19. Selama proses penyusunan APBD, DPRD menolak beberapa program prioritas yang telah diusulkan oleh eksekutif karena dinilai tidak realistis terhadap kemampuan fiskal daerah. Dari sisi penganggaran sektor publik, apa makna kejadian tersebut?
- a. Kegagalan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan
 - b. Bukti lemahnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif

c. Implementasi prinsip *check and balance* dalam siklus anggaran

d. Upaya untuk mempercepat proses pembahasan RAPBD

e. Intervensi politik yang menghambat proses perencanaan

20. Dalam kerangka *Medium-Term Expenditure Framework (MTEF)*, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun anggaran yang mempertimbangkan proyeksi kebutuhan belanja hingga tiga tahun ke depan. Apa keunggulan utama dari pendekatan ini dibandingkan anggaran tahunan tradisional?

a. Mengurangi proses revisi anggaran di tengah tahun

b. Memberikan fleksibilitas lebih besar kepada eksekutif

c. Mendorong konsistensi kebijakan fiskal dan keberlanjutan program

d. Memudahkan pengawasan eksternal oleh BPK

e. Menyederhanakan struktur laporan keuangan daerah

Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

21. Pemerintah Kota B menggunakan pendekatan *performance budgeting* untuk penyusunan APBD. Namun, hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar satuan kerja masih berfokus pada serapan anggaran, bukan pada capaian hasil. Berdasarkan hal ini, apa kelemahan yang paling mungkin muncul dalam penerapan jenis anggaran tersebut?

a. Tidak adanya ukuran kinerja yang jelas dalam setiap kegiatan

b. Pengeluaran pemerintah tidak sesuai dengan standar akuntansi

c. Terlalu banyak laporan keuangan yang harus dibuat

d. Pendapatan daerah sulit diprediksi dengan tepat

e. Kegiatan pemerintah menjadi tidak transparan

22. Sebuah kementerian menggunakan *zero-based budgeting* dalam perencanaan anggarannya. Namun, pegawai merasa sistem ini terlalu kompleks dan memakan waktu lama. Apa alasan manajerial paling logis yang menjelaskan mengapa pendekatan ini sulit diterapkan di sektor publik?

a. Karena setiap program harus dievaluasi dan disetujui dari nol setiap periode anggaran

b. Karena anggaran ditentukan berdasarkan jumlah penerimaan tahun sebelumnya

- c. Karena sistem ini hanya fokus pada kegiatan rutin, bukan inovasi
- d. Karena pemerintah pusat tidak memiliki data keuangan yang lengkap
- e. Karena laporan keuangan belum berbasis akrual penuh

23. Dalam sistem *line-item budgeting*, fokus utama adalah pada pengendalian input dan kepatuhan terhadap alokasi dana.

Jika suatu pemerintah daerah ingin beralih ke sistem yang lebih menekankan pada hasil (outcome), jenis anggaran apa yang paling sesuai untuk diterapkan?

- a. Anggaran berbasis kas
- b. Anggaran tradisional
- c. Anggaran berbasis kinerja
- d. Anggaran surplus-defisit
- e. Anggaran darurat (*contingency budgeting*)

24. Pemerintah provinsi ingin mendorong efisiensi belanja dengan menggabungkan program lintas sektor, seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, dalam praktiknya sulit menentukan berapa alokasi ideal untuk masing-masing sektor.

Jenis anggaran apa yang paling mendukung kolaborasi lintas sektor semacam ini?

- a. Anggaran tradisional
- b. Anggaran berbasis program
- c. Anggaran darurat
- d. Anggaran berbasis kas
- e. Anggaran surplus-defisit

25. Dalam situasi krisis ekonomi, pemerintah pusat menetapkan *contingency budget* untuk menghadapi pengeluaran tidak terduga seperti bencana alam dan stabilisasi harga pangan.

Bagaimana penerapan jenis anggaran ini mencerminkan prinsip pengendalian fiskal yang baik?

- a. Pemerintah menyiapkan dana cadangan untuk menjaga keberlanjutan fiskal tanpa mengganggu program utama
- b. Pemerintah menunda seluruh program baru sampai kondisi ekonomi membaik
- c. Pemerintah menggunakan pinjaman luar negeri untuk menutup semua kekurangan anggaran

- d. Pemerintah menambah pajak masyarakat secara langsung untuk menambah pendapatan
- e. Pemerintah menyalurkan dana cadangan tanpa mekanisme pelaporan

Investasi Sektor Publik

26. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan rumah sakit baru dengan dana APBD dan pinjaman daerah. Dari hasil *cost-benefit analysis*, proyek ini memiliki manfaat sosial tinggi tetapi pengembalian finansial rendah. Sebagai analis keuangan publik, keputusan apa yang paling tepat?
- a. Menolak proyek karena tidak menguntungkan secara finansial
 - b. Melanjutkan proyek karena manfaat sosial lebih besar daripada keuntungan finansial
 - c. Menunda proyek sampai kondisi ekonomi membaik
 - d. Mengalihkan investasi ke sektor swasta untuk menekan risiko
 - e. Mengurangi skala proyek agar dana lebih kecil
27. Dalam menganalisis investasi proyek jalan tol pemerintah, diketahui nilai *Net Present Value (NPV)* positif, tetapi *Benefit-Cost Ratio (BCR)* kurang dari 1. Apa interpretasi yang paling tepat dari hasil tersebut?
- a. Proyek tidak layak secara sosial karena manfaat lebih kecil dari biayanya
 - b. Proyek tetap layak karena NPV positif menunjukkan keuntungan finansial
 - c. Perlu dilakukan analisis sensitivitas untuk mengevaluasi kembali kelayakan proyek
 - d. Proyek harus dihentikan karena hasil keduanya kontradiktif
 - e. Nilai BCR tidak relevan dalam investasi publik
28. Sebuah proyek penyediaan air bersih pedesaan dinilai layak berdasarkan analisis keuangan. Namun, setelah dilaksanakan, masyarakat tidak menggunakan fasilitas tersebut karena lokasi distribusi terlalu jauh. Dari sudut pandang analisis investasi sektor publik, aspek apa yang diabaikan?
- a. Analisis biaya modal
 - b. Analisis ekonomi regional
 - c. Analisis kelayakan sosial dan partisipasi masyarakat

- d. Analisis risiko finansial
- e. Analisis *break-even point*

29. Pemerintah pusat ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya di daerah terpencil dengan investasi awal yang besar. Dalam analisis investasi publik, apa alasan utama proyek semacam ini tetap diprioritaskan meskipun *payback period* sangat panjang?

- a. Karena proyek tersebut mendatangkan keuntungan bagi investor swasta
- b. Karena proyek tersebut meningkatkan daya saing ekspor energi
- c. Karena proyek tersebut memberikan manfaat eksternalitas positif yang signifikan
- d. Karena proyek tersebut dapat menekan defisit anggaran negara
- e. Karena proyek tersebut mengurangi biaya tenaga kerja pemerintah

30. Sebuah proyek transportasi publik dinilai layak secara ekonomi dan sosial, namun mengalami hambatan realisasi akibat perbedaan kepentingan antar instansi. Dari perspektif sistem investasi publik, apa langkah strategis yang seharusnya dilakukan pemerintah?

- a. Menghentikan proyek karena konflik koordinasi sulit diatasi
- b. Mengalihkan proyek ke sektor swasta agar lebih efisien
- c. Membentuk satuan kerja lintas instansi untuk memastikan koordinasi dan pengendalian proyek
- d. Menurunkan target manfaat sosial agar lebih realistis
- e. Menunda proyek sampai anggaran berikutnya tersedia

Penentuan Harga Pelayanan Sektor Publik

31. Pemerintah daerah berencana menaikkan tarif retribusi kebersihan untuk menutup biaya operasional yang terus meningkat. Namun, sebagian masyarakat berpenghasilan rendah keberatan dengan kebijakan ini. Jika tujuan pemerintah adalah menjaga keberlanjutan layanan dan keadilan sosial, model penentuan harga yang paling tepat adalah...

- a. Tarif seragam untuk seluruh lapisan masyarakat
- b. Tarif berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay principle*)
- c. Tarif berdasarkan biaya aktual per unit layanan

- d. Tarif subsidi silang antar wilayah
- e. Tarif progresif berdasarkan volume sampah

32. Sebuah rumah sakit pemerintah ingin menentukan tarif layanan rawat inap kelas III. Analisis menunjukkan bahwa biaya per unit layanan lebih tinggi daripada tarif yang berlaku. Jika tujuan utama adalah menjaga keseimbangan biaya dan mutu pelayanan, kebijakan yang paling rasional adalah...

- a. Menyesuaikan tarif agar setara dengan biaya aktual pelayanan
- b. Menurunkan mutu pelayanan agar sesuai dengan tarif yang berlaku
- c. Menambah jumlah pasien agar biaya tetap bisa terbagi
- d. Meminta tambahan subsidi tanpa mengubah struktur tarif
- e. Menghapus kelas III dan menyatukannya dengan kelas II

33. Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi tarif transportasi publik dan menemukan bahwa biaya operasional meningkat akibat harga bahan bakar, tetapi tarif belum direvisi selama 5 tahun. Apa risiko utama jika tarif tetap dipertahankan tanpa subsidi tambahan?

- a. Meningkatnya efisiensi pelayanan publik
- b. Turunnya kualitas layanan dan potensi kerugian jangka panjang
- c. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah
- d. Meningkatnya keuntungan dari volume pengguna
- e. Penurunan inflasi daerah karena biaya transportasi tetap

34. Sebuah perguruan tinggi negeri menetapkan uang kuliah tunggal (UKT) dengan sistem berjenjang berdasarkan penghasilan orang tua mahasiswa. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip...

- a. *Benefit principle* – semakin besar manfaat, semakin besar pembayaran
- b. *Ability to pay principle* – semakin tinggi kemampuan ekonomi, semakin besar kontribusi
- c. *Marginal cost principle* – tarif ditentukan oleh tambahan biaya per mahasiswa
- d. *Full cost recovery* – tarif mencakup seluruh biaya operasional
- e. *Equal treatment principle* – semua mahasiswa membayar tarif sama

35. Pemerintah kota ingin menentukan tarif parkir baru di kawasan pusat kota dengan tujuan mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan tujuan ganda tersebut, kebijakan tarif yang paling tepat adalah...

a. Menetapkan tarif rendah agar masyarakat tetap menggunakan kendaraan pribadi

b. Menaikkan tarif tinggi di pusat kota dan memberikan tarif rendah di area pinggiran

c. Menetapkan tarif sama di seluruh wilayah agar lebih adil

d. Menghapus tarif parkir untuk menarik wisatawan

e. Menentukan tarif berdasarkan jumlah kendaraan di kota